



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.114, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78112

Telp. 0561-732065, Fax. 0561-732065

Web: pt-pontianak.go.id – Email: pengadilantinggipontianak@gmail.com

Pontianak, 15 November 2024

Nomor : 3038 /KPT.W17-U/RA.1.1/XI/2024
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pada Pengadilan Negeri Pontianak

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

- Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak dimaksudkan untuk:
 - memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Pengadilan Negeri Pontianak memperoleh nilai sebesar **76,70 atau BB (Sangat Baik)**.
- Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,10	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,65	11,85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25	19,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			74,00	76,70
Predikat			BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

No	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>Cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>Crosscutting</i>), namun terdapat kondisi : Target kinerja yang telah disusun belum menunjukkan target yang menantang hendaknya penyusunan target tahun- tahun berikutnya dinaikkan sedikit dari target sebelumnya selama masih yakin bisa dijangkau dengan inovasi dan kerja keras.
2.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun terdapat kondisi : Belum melampirkan dokumen Surat Keputusan Tim Monev SOP Pengadilan Negeri Pontianak.
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun terdapat kondisi : Belum melengkapi dokumen PKP Pegawai Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2023.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, dan terdapat kondisi : Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I, Sasaran Strategis II dan Sasaran Strategis IV belum sesuai dengan Standar, dimana nilai rata- rata Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis tersebut harus mencapai 100%
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun terdapat kondisi : Belum terdapat dokumen Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan Tahun 2023.
2.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, namun terdapat kondisi : Belum ada Dokumen Surat Keputusan TIM Penyusun SAKIP Pengadilan Negeri Pontianak.

No	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>Cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>Crosscutting</i>), untuk optimalisasinya Satker agar dapat : Memperbaiki penyusunan target yang disusun, sebaiknya menunjukkan target yang menantang atau meningkat dari tahun ke tahun, selama masih yakin bisa dijangkau dengan inovasi dan kerja keras.
2.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, untuk optimalisasinya Satker agar dapat : Melampirkan dokumen Surat Keputusan TIM Monev SOP Pengadilan Negeri Pontianak.

B. Pengukuran Kinerja	
1.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, untuk optimalisasinya Satker agar dapat : Melengkapi dokumen PKP Pegawai Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2023.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, untuk optimalisasinya Satker diharapkan agar : Lebih cermat dalam menyusun dokumen Laporan Kinerja dan disesuaikan dengan Standar yang ditentukan, sehingga meminimalisir kekeliruan informasi data yang ditampilkan. Penentuan target capaian kinerja juga harus dicermati, sehingga Realisasi Capaian Kinerja pada tiap Sasaran Strategis dapat mencapai 100%.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, untuk optimalisasinya Satker agar Menambahkan dokumen Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan Tahun 2023.
2.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, untuk optimalisasinya Satker agar: Segera menyusun dan melampirkan Surat Keputusan Pedoman Evaluasi AKIP serta Surat Keputusan Tim Penyusun SAKIP PN Pontianak.

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2023, agar rekomendasi ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya, dan kepada Pengadilan Negeri Pontianak segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2024. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,



F. WILLEM SAIJA

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI